



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 /POJK.03/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 38/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa diperlukan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional bank melalui penggunaan sistem elektronik yang terintegrasi;
 - b. bahwa untuk mendukung penggunaan sistem elektronik yang terintegrasi diperlukan penyesuaian kebijakan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum;
 - c. bahwa penggunaan sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan

atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 38/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bank wajib menempatkan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia.
- (2) Bank hanya dapat menempatkan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia sepanjang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Sistem Elektronik yang dapat ditempatkan pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. Sistem Elektronik yang digunakan untuk mendukung analisis terintegrasi dalam rangka memenuhi ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas negara asal Bank yang bersifat global, termasuk lintas negara;
 - b. Sistem Elektronik yang digunakan untuk manajemen risiko secara terintegrasi dengan kantor pusat Bank atau kantor induk/kantor entitas utama di luar wilayah Indonesia;
 - c. Sistem Elektronik yang digunakan untuk penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme secara terintegrasi dengan kantor pusat Bank atau kantor induk Bank di luar wilayah Indonesia;

- d. Sistem Elektronik yang digunakan untuk pelayanan kepada nasabah secara global, yang memerlukan integrasi dengan Sistem Elektronik milik grup Bank di luar wilayah Indonesia;
 - e. Sistem Elektronik yang digunakan untuk manajemen komunikasi antara kantor pusat Bank dengan kantor cabang, atau antara anak perusahaan dengan perusahaan induk; dan/atau
 - f. Sistem Elektronik yang digunakan untuk manajemen intern Bank.
- (4) Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dengan syarat Bank:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5);
 - b. menyampaikan hasil analisis *country risk*;
 - c. memastikan penyelenggaraan Sistem Elektronik di luar wilayah Indonesia tidak mengurangi efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. memastikan bahwa informasi mengenai rahasia Bank hanya diungkapkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Bank dengan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi;
 - e. memastikan bahwa perjanjian tertulis dengan penyedia jasa Teknologi Informasi memuat klausula pilihan hukum;
 - f. menyampaikan surat pernyataan tidak keberatan dari otoritas pengawas penyedia jasa Teknologi Informasi di luar wilayah Indonesia bahwa Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa Teknologi Informasi;
 - g. menyampaikan surat pernyataan bahwa Bank menyampaikan secara berkala hasil penilaian

- yang dilakukan kantor bank di luar wilayah Indonesia atas penerapan manajemen risiko pada pihak penyedia jasa Teknologi Informasi;
- h. memastikan manfaat dari rencana penempatan Sistem Elektronik di luar wilayah Indonesia bagi Bank lebih besar daripada beban yang ditanggung oleh Bank; dan
 - i. menyampaikan rencana Bank untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Bank baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Teknologi Informasi maupun transaksi bisnis atau produk yang ditawarkan.
- (5) Bank wajib memastikan bahwa data yang digunakan dalam Sistem Elektronik yang ditempatkan pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia tidak digunakan untuk tujuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan penempatan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia:
- a. tidak sesuai dengan rencana penempatan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. berpotensi berdampak negatif terhadap kinerja Bank; dan/atau
 - d. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Bank untuk menempatkan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia.

- (7) Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
 - (8) Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan setelah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank;
 - b. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
 - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 - d. larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
2. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Bank wajib mengimplementasikan rencana tindak (*action plan*) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
- (2) Bank yang tidak mengimplementasikan rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1).

3. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 88

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 /POJK.03/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 38/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK UMUM

I. UMUM

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional Bank serta memberikan layanan perbankan yang lebih baik kepada nasabah, diperlukan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai. Hal ini dapat diwujudkan melalui penggunaan Sistem Elektronik yang terintegrasi dengan grup Bank, termasuk yang berada di luar wilayah Indonesia.

Untuk mendukung penggunaan Sistem Elektronik yang terintegrasi diperlukan penyesuaian ketentuan dengan lebih mengedepankan efektivitas dan efisiensi operasional Bank dan penguatan aspek pengawasan dalam penggunaan data pada Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas negara asal Bank (*home regulatory*) untuk kantor cabang yaitu sesuai dengan kedudukan kantor pusat Bank di luar wilayah Indonesia, sedangkan untuk kantor subsidiari sesuai dengan kedudukan kantor induk/kantor entitas utama, berupa bank di luar wilayah Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pelayanan kepada nasabah secara global berupa sistem elektronik *front end* yang digunakan oleh Bank atau oleh nasabah untuk memperoleh layanan Bank yang disediakan secara global bagi seluruh nasabahnya baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, sebagai contoh *global cash management system*.

Sementara Sistem Elektronik yang digunakan untuk memproses laporan kepada otoritas dan *back end system* yang terakhir memproses data individu, akun, dan/atau transaksi nasabah, tetap ditempatkan di wilayah Indonesia.

Back end system antara lain *core banking system* yang digunakan untuk memproses data nasabah,

giro, tabungan, deposito, dan kredit atau pembiayaan; serta *back end system* lain misalnya yang digunakan untuk memproses kartu kredit, syariaah *card, treasury*, pembiayaan perdagangan, dan *general ledger*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sistem Elektronik yang digunakan untuk manajemen intern yaitu sistem yang digunakan Bank untuk keperluan intern, yang tidak terkait dengan pelayanan kepada nasabah dan/atau operasional Bank.

Sistem Elektronik yang digunakan untuk manajemen intern antara lain:

- 1) sistem kepegawaian;
- 2) sistem remunerasi; dan/atau
- 3) sistem audit intern.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak mengurangi efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan” adalah tidak menimbulkan kesulitan bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan seperti adanya akses terhadap Pangkalan Data dan memiliki struktur Pangkalan Data dari setiap aplikasi yang digunakan.

Huruf d

Ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan

tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia Bank.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Surat pernyataan hanya disampaikan bagi pihak penyedia jasa Teknologi Informasi yang memiliki otoritas pengawasan.

Huruf g

Kantor bank di luar wilayah Indonesia :

1. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia yaitu kantor pusat atau kantor lainnya; atau
2. bagi Bank yang dimiliki lembaga keuangan asing yaitu kantor induk bank.

Surat pernyataan disampaikan termasuk jika Bank memiliki kantor bank di wilayah yang sama dengan wilayah kedudukan penyedia jasa Teknologi Informasi.

Huruf h

Manfaat yang diharapkan antara lain peningkatan kualitas layanan kepada nasabah serta penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 42A

Cukup jelas.

Pasal 43A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6486